

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2016 - 2021**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS CARA PERHITUNGAN	
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat	Tingkat Keselarasan RKPd dan RPJMD	%	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dok perencanaan dan rencana tahunan	Keselarasan Program : $\frac{\text{Jumlah Program pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	%	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dok perencanaan dan rencana	Keselarasan Program : $\frac{\text{Jumlah Program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan Program pembangunan dengan perencanaan	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	%	Kepala Bappeda Kabupaten /Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkupkabupaten/kota oleh karna itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi tingkat pelaksanaan program skpd	Jumlah Program yang dilaksanakan oleh SKPD dan jumlah program yang direncanakan dalam RKPd	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	%	Berdasarkan Perpres RI no. 29 Th. 2014 tentang Instansi Pemerintah dan dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>85), A(>75-85), B(>65-75), CC(>50-65), C(>30-50) dan D(0-30)	Inspektorat
		Nilai IKM Bappeda	Point	Berdasarkan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untu meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan public Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui (IKM)	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Ir. H. R. M. HENRY NUGROHO, MP
NIP. 19590516 198603 1 006